

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Minollah. (2020). *Pajak Daerah (Kajian Teoritik dan Konseptual)*. (D. Harmin, Ed.)  
Mataram: Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI).
- Panggabean, L. (2022). Kontribusi Pajak Provinsi Dan Pajak Kabupaten/Kota Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus: Provinsi DKI Jakarta 2017-2022). *JEMAP Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan*, 204-205.
- (2007). *Pedoman Nasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. (n.d.).
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat. (n.d.).
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan. (n.d.).
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Pajak Rokok. (n.d.).

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. (n.d.).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115 /PMK.07 /2013. (n.d.).

Pratama, N. P., Dwitmanto, & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1-8.

Putri, O. M., & Pratomo, D. (2015, Agustus). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung Periode 2011-2013. *e-Proceeding of Management*, 2(2), 1621-1631.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (n.d.).

Wahluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ke-Empat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah)